



Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Setyobudi

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

Email: setyobudipati@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: setyobudipati@gmail.com

Submitted: **01/02/2022**; Accepted: **19/02/2022**; Published: **25/02/2022**

Abstrak–Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan, kapasitas SDM berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja pada dinas lingkungan SKPD Kabupaten Pati dalam laporan keuangan tahun 2021 menyandang predikat WTP enam kali dari BPK. Dalam penelitian ini menggunakan kriteria tertentu, yaitu pegawai bagian keuangan, memiliki jenjang pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat dan telah bekerja minimal satu tahun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari kuesioner yang disebar. Data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, dan penjelasan atau gambaran umum organisasi serta data jumlah pegawai bagian keuangan pada masing-masing Dinas. Pengujian data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji multikolenearitas, dan uji heteroskedastisitas, sedangkan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SMART PLS.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Kualitas; Pengaruh Pemahaman; Pengelolaan; Sistem Akuntansi; Sumber Daya Manusia

Abstract–This study aims to understand the financial accounting system and financial management, the capacity of human resources partially or simultaneously influences the quality of information on the financial statements of the local government of Pati Regency. The sampling technique used was purposive sampling. Respondents sampled in this study, namely employees who work at the Pati Regency SKPD environmental service in the 2021 financial report, bear the WTP predicate six times from the BPK. In this study, certain criteria were used, namely employees of the finance department, having a minimum education level of high school/equivalent and having worked for at least 1 year. The types of data used in this study are primary and secondary data. The primary data in this study were the respondents' answers to the questionnaires distributed. Secondary data in this study is the organizational structure, and an explanation or general description of the organization as well as data on the number of employees in the finance department in each department. Testing the data is done by testing the validity and reliability test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, while hypothesis testing with multiple regression analysis using the SMART PLS program.3. The results showed that both partially and simultaneously Understanding of Regional Financial Accounting Systems, Regional Financial Management, and Human Resource Capacity had a positive and significant effect on the Quality of Information on Local Government Financial Reports.

Keywords: Accounting System; Human Resource; Influence of Understanding; Management; Quality

1. PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan tuntutan prioritas utama menjadi perhatian bagi publik, untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan dengan baik. Otonomi daerah harus dapat menciptakan dan menyajikan sistem akuntansi daerah secara komprehensif. Laporan keuangan harus sesuai koridor dengan konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Pati selalu mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK enam kali berturut turut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut: Andal, Relevan, Dapat dipahami, Dapat dibandingkan. Akuntabilitas informasi laporan keuangan daerah sangat penting, sebagai cermin kualitas. Laporan keuangan harus menyajikan kemudahan supaya dapat dipahami oleh stakeholder. Kualitas informasi laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, enatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP NO. 58 TAHUN 2005, 2005). Terlebih Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Parmendagri



No.77 Tahun (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020, 2020) tentang pedoman pengelolaan keuangan pemerintah daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari perencanaan, peranggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan dengan manual atau memakai aplikasi komputer.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD kota Samarinda, diperoleh hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Widiawati, 2019). Selain itu Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Defitri, 2018).

Berdasarkan riset gap yang ada di setiap variabel maka Penelitian tertarik untuk melakukan penelitian kembali pada tiap variabel yang ada. Penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain melakukan Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD kota Samarinda, diperoleh hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Widiawati, 2019). Selain itu Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan riset gap yang ada di setiap variabel maka Penelitian tertarik untuk melakukan penelitian kembali pada tiap variabel yang ada. Penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Perbedaan Penelitian ini adalah masa penelitian tahun 2021, memakai tiga variabel bebas (dengan menambah variabel Kapasitas SDM), lokasi Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Pati, menggunakan alat uji statistik SmartPLS.

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Yosefrinaldi, 2013). Berdasarkan hal tersebut pegawai harus siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Werther dan Davis dalam (Utama, 2020).

Laporan keuangan PEMDA Pati menyandang WTP dari BPK enam kali berturut turut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaruh sistem akuntansi daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Pati; Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Pati; Bagaimana pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Pati.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer, berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati yang berjumlah 70 orang dari 25 SKPD. Penentuan sampel metode Purposive sampling ditetapkan dengan jumlah 70 orang dari 25 SKPD.
- b. Data skunder: berupa bukti, catatan Pustaka, laporan, buku, jurnal dan berbagai dokumen lain. Data sekunder diperoleh peneliti melalui dokumen.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati yang berjumlah 70 orang dari 25 SKPD. Penentuan sampel ditetapkan dengan jumlah 70 orang dari 25 SKPD. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Aparat pemerintah daerah yang ada di Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor dan Inspektorat yang membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- b. Aparat tersebut yang menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran.
- c. Pendidikan terakhir minimal SMA dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

2.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tergantung /dependen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)



Laporan akuntansi keuangan daerah menyajikan catatan informasi dari data berbagai akun struktur kekayaan dan struktur finansial sebagai cerminan hasil aktivitas keuangan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: Laporan keuangan disajikan sesuai batas pemahaman para pengguna; Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas; Penyajian laporan keuangan tepat waktu

b. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Pemahaman Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu suatu kemampuan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memahami bentuk pelaporan akuntansi yang terdiri dari tahapan pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data yang terkait dengan keuangan dari entitas sehingga bisa memahami informasi keuangan yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, Identifikasi analisis transaksi, Klasifikasi sesuai pos pos, Pengendalian untuk mengukur dan catatan laporan (Kawatu, 2019). Pemahaman Sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal ini diukur dengan indikator sebagai berikut :Identifikasi analisis transaksi; Klasifikasi sesuai pos pos; Pengendalian untuk mengukur dan catatan laporan.

c. Pengelolaan keuangan Daerah (X2)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan disetiap SKPD. Pengelolaan keuangan yang disusun secara baik dan benar, maka semakin baik pula mencerminkan kinerja keuangan yang digunakan (Amin, 2015). Dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: Pakai metode akuntansi sama setiap tahun; Entitas pelaporan dibagi tahapan periode; 3. Realisasi anggaran minimal setahun sekali; Transaksi dicatat sesuai subtransaksi dan realisasi

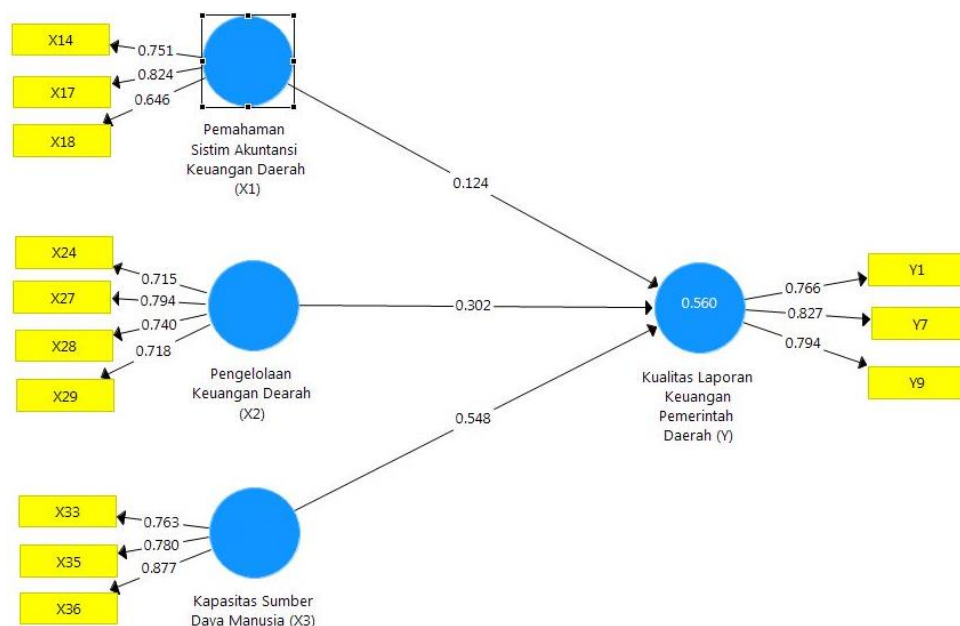
d. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3)

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien(Warjiyono et al., 2021). Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil(Zuliarti, 2012). Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini diukur dengan indikator sebagai berikut: Jenjang Pendidikan; Reward / penghargaan; Phunisem /hukuman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Instrumen Data

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas didistribusikan kepada 70 karyawan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor PEMDA Kabupaten PATI Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan mencakup pemahaman sistim akuntansi keuangan daerah , pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan tahun 2021 dianalisis menggunakan alat analisis SmartPLS. Skema Model Partial Least Square (PLS) pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan program smartPLS Berikut ini adalah skema model program PLS yang diajukan:



Gambar 1. Outer Model



3.2 Analisis Uji Validitas

Dalam melakukan penelitian, uji ini sebagai pengukuran apakah setiap pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuesioner mampu mewakili variabel yang diteliti. Dalam penggunaan Smart PLS pengukuran validitas dilakukan dengan 2 cara dan hasil analisis yang sudah dilakukan adalah:

a. Convergent Validity

Outer Loadings

	Kapasitas Sumber Daya ...	Kualitas Laporan Keu...	Pemahaman Sistim ...	Pengelolaan Keuangan ...
X14			0.751	
X17			0.824	
X18			0.646	
X24				0.715
X27				0.794
X28				0.740
X29				0.718
X33	0.763			
X35	0.780			
X36	0.877			
Y1		0.766		
Y7		0.827		
Y9		0.794		

Gambar 2. Outer Loadings

Hasil temuan pada Gambar 2. di atas menunjukkan bahwa 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti pemahaman sistim akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dalam setiap pertanyaan yang mewakili masing-masing variabel memiliki nilai loading factor > 0,6 maka dapat dinyatakan pertanyaan yang mewakili setiap variabel memenuhi.

b. Discriminant Validity

Pengukuran discriminant validity dengan menggunakan nilai cross loading dan nilai average variance extracted (AVE). Hasil temuan pada pengujian ini dengan average variance extracted (AVE) menunjukkan bahwa nilai AVE yang dihasilkan setiap variabel yang digunakan lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan memenuhi syarat yang disajikan pada Gambar 2. yang menunjukkan melewati batas ketentuan 0,5.

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Co
Kapasitas Sum...	0.738	0.780	0.849	0.653	
Kualitas Lapora...	0.711	0.713	0.838	0.634	
Pemahaman Si...	0.609	0.649	0.786	0.553	
Pengelolaan Ke...	0.728	0.729	0.831	0.551	

Gambar 3. Hasil Analisis Average Variance Extruted (AVE)

Berdasarkan sajian gambar 3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai AVE dari variabel kualitas laporan keuangan > 0,5 atau sebesar 0,711, untuk nilai variabel pemahaman SIA > 0,5 atau sebesar 0,609, untuk nilai variabel pengelolaan keuangan daerah > 0,5 atau sebesar 0,728, dan untuk variabel kapasitas sumber daya manusia > 0,5 atau sebesar 0,738. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik.

Discriminant Validity

	Kapasitas Sumber ...	Kualitas Laporan Keu...	Pemahaman Sistim Akuntansi ...	Pengelolaan Keuangan...
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3)	0.808			
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.661	0.796		
Pemahaman Sistim Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0.317	0.415	0.744	
Pengelolaan Keuangan Dearah (X2)	0.244	0.484	0.388	0.742



Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Corrected			
	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O...	P Values
X14 <- Pemaha...	0.751	0.698	0.194	3.869	0.000
X17 <- Pemaha...	0.824	0.799	0.133	6.206	0.000
X18 <- Pemaha...	0.646	0.623	0.209	3.088	0.002
X24 <- Pengelo...	0.715	0.712	0.106	6.724	0.000
X27 <- Pengelo...	0.794	0.783	0.066	11.997	0.000
X28 <- Pengelo...	0.740	0.726	0.085	8.699	0.000
X29 <- Pengelo...	0.718	0.696	0.123	5.849	0.000
X33 <- Kapasit...	0.763	0.746	0.104	7.369	0.000
X35 <- Kapasit...	0.780	0.737	0.148	5.279	0.000
X36 <- Kapasit...	0.877	0.883	0.041	21.340	0.000
Y1 <- Kualitas ...	0.766	0.753	0.082	9.343	0.000
Y7 <- Kualitas ...	0.827	0.821	0.052	15.859	0.000
Y9 <- Kualitas ...	0.794	0.790	0.061	13.020	0.000

Gambar 4. Diskriminan Validity

Hasil yang sudah diperoleh diatas menunjukkan bahwa nilai setiap item pertanyaan pemahaman sistim akuntansi keuangan daerah , pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan, cross loading > besar dalam melakukan perbandingan antara variabel pada pertanyaan yang digunakan untuk mewakilinya.

3.3 Analisis Uji Realibilitas

Selanjutnya pengukuran Reliabilitas akan menunjukkan sebesar akuratnya konsistensi jawaban responden dalam variabel yang digunakan untuk menentukan apakah responden konsisten dalam menjawab personal yang diteliti. Dalam pengukuran ini ada 2 cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Composite Reliability

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator variabel, suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite reliability > 0,7 mempunyai reliabilitas yang tinggi meskipun 0,6 masih dapat diterima. Penyajian Gambar 5. di bawah ini dan untuk memperkuat dengan

menggunakan tabel pada gambar berikut:

Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Co
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	
Kapasitas Sum...	0.738	0.780	0.849	0.653	
Kualitas Lapora...	0.711	0.713	0.838	0.634	
Pemahaman Si...	0.609	0.649	0.786	0.553	
Pengelolaan Ke...	0.728	0.729	0.831	0.551	

Gambar 5. Composite Reliability

Berdasarkan Gambar 5 di atas hasil dari Cronbach's Alpha variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, kurang dari 0,7 tetapi lebih dari 0,5 yaitu sebesar 0,609, Pengelolaan Keuangan Daerah > 0,7 yaitu sebesar 0,728, Kapasitas Sumber Daya Manusia > 0,7 yaitu sebesar 0,738, dan Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah > 0,7 yaitu sebesar 0,711. Dengan' demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai Cronbach's Alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

3.4 Analisis Uji Multikolinieritas

Pengujian ini untuk melihat apakah setiap variabel independen memiliki korelasi antar variabel independen atau tidak. Kriteria yang berlaku dalam uji multikolinearitas adalah apabila nilai VIF < 3,5-5. Hasil dari uji multikolineritas disajikan pada Gambar 6.



Collinearity Statistics (VIF)

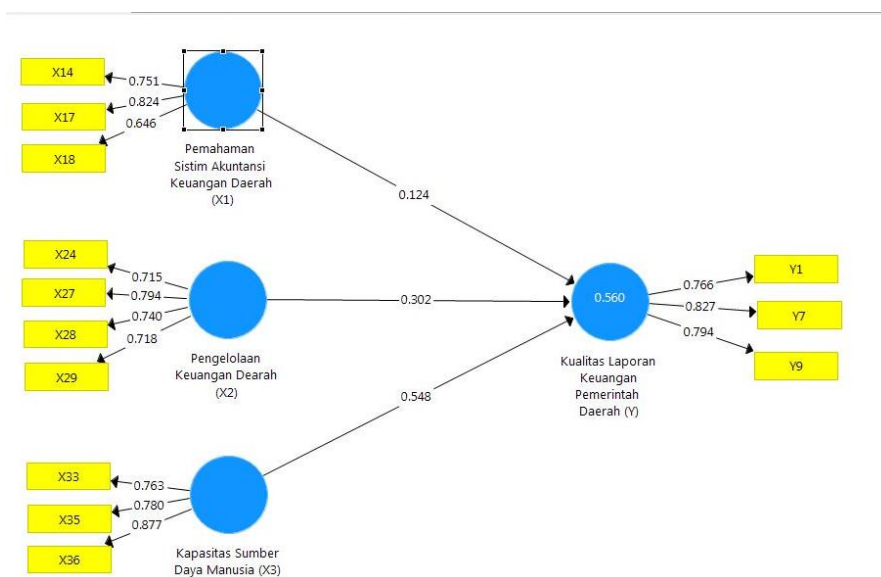
Outer VIF Values		Inner VIF Values
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)		
Kualitas Lapora...		
Kapasitas Sum...		1.134
Pengelolaan Ke...		1.200
Pemahaman Si...		1.255

Gambar 6. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan gambar 6 di atas, hasil dari Collinierity Statistics (VIF) untuk melihat uji multicolinierity dengan hasil nilai inner dari variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1,255 Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1,200. Kemudian nilai dari variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1,134 Dari masing-masing variabel VIF < 5 maka tidak melanggar uji asumsi multikolineraritas atau pada masing masing variabel dalam smart PLS < 3, berwarna hijau maka dapat dikatakan sangat jelas tidak terjadi korelasi antar variabel.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia,memiliki nilai VIF < 3, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolineritas.

3.5 Analisis Model Struktural (Inner Model)



Gambar 7. Inner Model

Inner model menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai hasil uji path coefficient, uji goodness of fit dan uji hipotesis.

3.6 Analisis Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Pengujian ini untuk menentukan model yang dibentuk layak untuk diteliti atau tidak dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan adalah:

R Square

Matrix	R Square	R Square Adjusted
Kualitas Lapora...	0.560	0.541

Gambar 8. Hasil R Square

Pada gambar 8 Hasil R-Square di atas digunakan untuk melihat pengaruh variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas



Laporan Keuangan Berdasarkan data pada Gambar 8. Di atas, diketahui bahwa besar pengaruh variabel Independen terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,560 atau 56 % . Kemudian penilaian goodness of fit menggunakan Q-square dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} Q \text{ square} &= 1 - ((1 - R^2)) \\ &= 1 - (1 - 0,56) \\ &= 1 - (0,44) \\ &= 1 - 0,440 \\ &= 0,560 \end{aligned}$$

Artinya dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai Q square sebesar 0,56 artinya tingkat keberagaman model yang ditunjukkan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sebesar 0,56 atau 56% dan sisanya 0,440 atau 44% masih dipengaruhi faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

Model_Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.100	0.100
d_uls	0.901	0.901
d_g	0.300	0.300
Chi-Square	119.655	119.655
NFI	0.595	0.595

Gambar 9. Hasil Analisis NFI

Dapat dijelaskan bahwa pengaruh terbesar ditunjukkan pada pengaruh variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 0,094 Kemudian pengaruh dengan nilai sebesar 0,108. Pengaruh terbesar ketiga adalah pengaruh variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,135. Berdasarkan hasil dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan model dalam variabel ini memiliki nilai *Path Coefficient* yang positif. Hal itu dapat diketahui karena semakin besar nilai *Path Coefficient* maka semakin kuat juga pengaruh atau hubungan variabel independen dan variabel dependen tersebut.

Path Coefficients

	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O...	P Values
Kapasitas Sum...	0.548	0.512	0.135	4.054	0.000
Pemahaman Si...	0.124	0.161	0.094	1.311	0.190
Pengelolaan Ke...	0.302	0.311	0.108	2.810	0.005

Gambar 10. Model (Pengaruh Variabel Independen Terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah)

Dengan nilai t tabel adalah 1,96 menurut (Gudono, 2011; Santoso, 2018), untuk menentukan signifikan atau tidaknya pada Gambar 10 dilihat dengan p Value dimana hasil analisis yang diperoleh adalah:

- Nilai yang dihasilkan pada variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan t statistik 0,094 yang *p value* 0,190 dapat dijelaskan nilai t statistik 0,094 < t tabel 1,9 atau *p value* 0,190 > 0,05 maka secara statistik H_0 diterima atau H_a ditolak artinya variabel kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
- Nilai yang dihasilkan pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan t statistik 0,108 yang *p value* 0,000 dapat dijelaskan nilai t statistik 0,108 > t tabel 0.056 , atau *p value* 0,000 < 0.05 maka secara statistik H_0 ditolak atau H_a diterima artinya variabel Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- Nilai yang dihasilkan pada variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dengan t statistik 0,135 yang *p value* 0,000 dapat dijelaskan nilai t statistik 0,135 > t tabel atau *p value* 0,000 < 0,05 maka secara statistik H_0 ditolak atau H_a diterima artinya variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.



4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisa penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

REFERENCES

- Amin, N. (2015). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN BENGKALIS. *Iqtishaduna*, 4, 80–91. <https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>
- Defitri, S. Y. (2018). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.22216/JBE.V3I1.2376>
- Gudono. (2011). *Analisis Data Multivariat* (1st ed.). BPFE. <https://books.google.co.id/books?id=nltaFSjgQ8kC>
- PP NO. 58 TAHUN 2005, Nomor 58 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik* (1st ed.). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=XYbMDwAAQBAJ>
- PP RI NOMOR 71 TAHUN 2010, (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Santoso, S. (2018). *Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=6CVtDwAAQBAJ>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020, (2020).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003, Nomor 17 (2003).
- Utama, Z. M. (2020). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA: Konsep Dasar dan Teori*. UNJ PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=OYgBEAAAQBAJ>
- Warjiyono, W., Suryanti, E., Rousyati, R., Fatmawati, F., Tazali, I., Lisnawati, L., & Rosihyana, R. (2021). Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Desa Karangmangu. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 156–163. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i1.9102>
- Widiawati. (2019). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelola Keuangan. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman*. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada DPKAD se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–24.
- Zuliarti, -. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: studi pada pemerintah Kabupaten Kudus*.